Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Akuntansi (JEBISMA)
Vol. 2 No. 2 Desember 2024 E-ISSN: 3030-9743

PENILAIAN PELAKSANAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN

Dafit Ramdani Ardiansah[1]; Hurian Kamela[2]
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan[1,2]
042256603@ecampus.ut.ac.id, hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilihat dari akuntabilitas lembaga pemerintah, terutama di daerah Kota Medan. Dengan pertumbuhan ekonomi global yang terus meningkat, berbagai jenis perusahaan dan lembaga keuangan muncul. Studi ini menggunakan kuisioner dari tiga puluh orang. Masalah akuntansi manajemen dan ekonomi pembangunan pemerintah termasuk dalam konteks ekonomi global di Indonesia. Akibatnya, akuntansi sektor publik membantu pengambilan keputusan ekonomi dengan mengawasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan keuangan lembaga pemerintah. Pemerintah pusat memutuskan untuk memulai pelaporan keuangan sebagai akibat dari meningkatnya tuntutan masyarakat tentang tata kelola secara efektif. Ini melakukannya dengan mengevaluasi bagaimana standar akuntansi pemerintah (SAP) memengaruhi kualitas mengenai pengelolaan keuangan di Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kota Medan meningkat secara signifikan.
Kata kunci : Akuntansi sektor publik; Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Salah satu jenis akuntansi yang paling umum digunakan oleh negara saat mereka membuat laporan keuangan adalah akuntansi sektor publik. Transparansi dan akuntabilitas telah menjadi bagian dari reformasi pengelolaan keuangan pemerintah Indonesia. Dengan memberikan informasi tentang akuntabilitas masing-masing lembaga pemerintah, pemerintah dapat mengetahui seberapa baik mereka melaksanakan tugas sesuai bidang tanggung jawabnya. Dengan informasi tentang akuntabilitas kinerja lembaga, pemerintah memiliki dasar untuk membuat keputusan tentang perbaikan administrasi dan meningkatkan urusan pemerintah. Karena pelayanan masyarakat adalah kunci untuk kepuasan kerja pemerintah, pelaksanaan mengenai pentingnya pengelolaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai hal yang perlu dianalisis. Peningkatan kinerja khuusnya untuk pelayanan publik penting bagi semua pegawai, masyarakat, dan lingkup usaha.

Sektor publik bertujuan utama untuk memberikan pelayanan publik, bukan untuk memaksimumkan keuntungan. Namun, apakah pelayanan kepada masyarakat efektif atau tidak, dan bagaimana peran pemerintah khususnya mengenai pelayanan publik. (Lantu et al., 2023). Pemerintah daerah yang bertanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari anggaran mereka sendiri. Satu cara pemerintah bertanggung jawab adalah melalui penganggaran negara. Pemanfaatan sumber daya secara merata dan adil dapat menghasilkan akuntabilitas publik. Untuk mencapai tata kelola negara yang baik, transparansi dan akuntabilitas sangat penting. Menurut (Lestari Utami et al., 2023) dalam karyanya yang berjudul Akuntansi Sektor Publik, tiga pilar utama pengelolaan pemerintahan yang efektif adalah partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Wilayah pusat atau daerah harus bisa memberi informasi mengenai kegiatan, pelaksanaan kinerja keuangan yang tepat waktu, andal, serta konsisten. Lembaga pemerintah akan mendapatkan manfaat dari penyediaan data yang benar dan akurat. (Rosana & Bharata,

2023). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dibuat mengingat pentingnya akuntabilitas pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Aturan Menteri Penggunaan Tenaga Kepegawaian dan Transformasi Administrasi Negara mengatur bagaimana sistem ini digunakan. (Adhillah, 2022). Banyak faktor yang berkontribusi pada rendahnya akuntabilitas pemerintahan di Indonesia, salah satunya adalah adanya praktik kecurangan di berbagai lembaga pemerintah, salah satunya adalah korupsi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menduduki level korupsi tertinggi di Asia Tenggara dan di dunia khususnya di wilayah pemerintahan. Dengan menerapkan akuntansi yang baik, efektifitas terhadap laporan keuangan pemerintah, akuntabilitas mengenai kinerja pemerintah semakin meningkat, sehingga kinerja pengelolaan urusan pemerintah menjadi lebih maksimal. Diharapkan bahwa peningkatan akuntabilitas ini akan berdampak pada pengurangan praktik korupsi, sehingga pemerintah Indonesia dapat mencapai pengel

Laporan keuangan selalu dibuat sesuai dengan peraturan akuntansi pemerintahan. Pemerintah diharapkan memberikan informasi keuangan berkualitas tinggi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, tidak terkecuali masyarakat. Pelaporan keuangan yang baik, pemantauan yang ketat, dan pengawasan yang efektif akan meningkatkan akuntabilitas kinerja badan-badan pemerintah. Diharapkan tingkat akuntabilitas ini akan mengurangi tingkat korupsi menjadi semakin menurun. Laporan keuangan sektor publik harus memenuhi standar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010), dan harus tepat waktu. Pihak-pihak yang berkepentingan menerima laporan keuangan daerah sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan. Selain itu, mengenai informasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan kredibel, dapat dibandingkan, serta mudah untuk dipahami, menurut standar akuntansi (PP 71/2010). Masalah kualitas laporan keuangan sektor publik masih perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini antara lain karena banyak orang belum menggunakan SAP saat membuat laporan keuangan. (Agustina Mutia et al., 2023)

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Untuk mengelola berbagai dana publik, lembaga negara tinggi dan departemen yang lebih rendah menggunakan akuntansi sektor publik dan analisis. Berdasarkan otonomi daerah serta pengelolaan mengenai desentralisasi fiskal diterapkan, akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang dengan cepat. Sistem akuntansi yang kuat diperlukan untuk mendukung otonomi daerah. Dengan bantuan sistem ini, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih baik, yang akan memungkinkan sistem desentralisasi untuk mengelola dana secara jelas, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan. Demokratisasi di lingkup publik diharapkan menciptakan pengelolaan keuangan daerah sehingga bertanggung jawab, adil dan logis. Yang paling penting dalam mengelola pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan negara dan daerah, adalah akuntabilitas dan transparansi. (Sari & Tamsir, 2023). Pemerintah daerah menggunakan akuntansi sektor publik. Meskipun ini adalah sistem prosedur manual, ada proses elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan dan melaporkan tentang keuangan, yaitu utang, ekuitas, aset semua bagian entitas. Pihak yang bekerja dalam pengelolaan keuangan memahami pola akuntansinya sehingga dapat memberikan laporan keuangan yang sesuai. Perencanaan dan pengendalian terdiri dari sistem informasi akuntansi, serta fungsi pengukuran dan pengendalian. Sistem informasi akuntansi berfungsi untuk menetapkan standar untuk transparansi khususnya pengelolaan uang negara.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Menurut Undang-undang Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai suatu dasar akuntansi digunakan untuk membuat dan menyampaikan laporan keuangan milik pemerintah. SAP

memiliki kewenangan hukum untuk membantu dalam peningkatan kualitas laporan keuangan, khususnya di sektor pemerintah.

Menurut Wirawan (2009), Berikut tujuan dan taktik komite yang mengembangkan standar akuntansi pemerintahan:

1. Dengan membuat dan mengembangkan standar akuntansi pemerintahan serta membantu penerapannya, KSAP berupaya meningkatkan akuntabilitas dan otorisasi pengelolaan keuangan pemerintah.
2. KSAP menggunakan praktik terbaik secara global, seperti memodifikasi International Public Set Accounting Standards (IPSAS).
3. Menurut rencana "adaptasi", pengembangan SAP pada dasarnya berpusat pada IPSAS tetapi dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan Indonesia, dengan mempertimbangkan undang-undang yang relevan, prosedur keuangan saat ini, dan kesiapan sumber daya pengguna SAP.
4. Proses cash to accrual yang berpindah dari cash basis ke accrual basis merupakan bagaimana rencana pengembangan SAP diimplementasikan. Dengan pendekatan ini, aset, utang, dan dana ekuitas didokumentasikan berdasarkan basis akrual, sedangkan pendapatan, pengeluaran, dan pendanaan dicatat berdasarkan basis kas.
5. Pada tahun 2007, prosedur peralihan dari basis kas ke basis akrual telah selesai.
6. Menggunakan sumber daya dan referensi yang disediakan oleh Federasi Akuntan Internasional untuk menyusun SAP dan KSAP. Pemerintah Indonesia (melalui peraturan keuangan negara), Dana Moneter Internasional, Komite Standar Akuntansi Internasional, Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – AS, Dewan Standar Akuntansi Pemerintah AS, dan asosiasi profesi internasional lainnya yang menangani audit, akuntansi, dan laporan keuangan

Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurut PP No. 58 Tahun 2005 yaitu perencanaan mengenai jumlah keuangan tahunan pemerintah daerah, yang harus disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. APBD berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan setempat dan dihitung secara moneter. APBD juga membantu mencapai tujuan pemerintah dengan menyediakan layanan dan meningkatkan kesejahteraan warga. (Kambey et al., 2023).

Selain itu, catatan atas laporan keuangan harus menjadi bagian laporan keuangan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa catatan keuangan dipahami oleh banyak pihak, bukan hanya satu pihak. Pemerintah membuat catatan atas laporan keuangan untuk membantu pembaca memahaminya dengan lebih baik karena laporan keuangan dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca baru. Catatan terkait laporan keuangan menjelaskan pos-pos laporan keuangan yang terkait dengan pengungkapan yang membantu pembaca laporan keuangan memahaminya. Dengan demikian, penerapan akuntansi public. Menurut PP 71/2010, standar akuntansi negara untuk menyajikan laporan keuangan negara, hubungan standar akuntansi negara dan kualitas laporan keuangan negara saling berkaitan. Anggraini (2017) menjelaskan kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh pengetahuan tentang standar akuntansi pemerintah. Munasyir (2015) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan di Kabupaten Aceh Utara dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah. Yunitasari et al., (2024) menyimpulkan bahwa peraturan akuntansi pemerintah sangat mempengaruhi kualitas laporan, sehingga:

H1: Penerapan SAP Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

METODE PENELITIAN

Untuk memahami sebab dan akibat, penelitian ini berdasarkan model kausal kuantitatif. Mengembangkan suatu teori yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan gejala adalah tujuan penelitian. Data kuantitatif sebagai data yang dihitung secara langsung

dengan penilaian menggunakan angka. Metode pengambilan sampel non-probability didasarkan pada kemudahan. Metodenya adalah kuisioner dari tiga puluh orang. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur dependen dan independent variabel menggunakan aplikasi SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Estimasi hasil

Model	B	Std Err.	t
(Constant)	7,055		
X1	0,369	5,268	0,000

Sumber: Olah data (2024)

Dengan 30 responden, analisis data menunjukkan bahwa pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai 0,618. Ini menunjukkan bahwa Y, yang merupakan kualitas pelaporan keuangan, sangat dipengaruhi oleh variabel independen X1, atau SAP. Rumus yang dihasilkan oleh uji regresi linier parsial adalah Y = 7,055 + 0,369X1. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap perubahan satu satuan pada variabel X1 (implementasi SAP), Y (kualitas laporan keuangan), dan konstanta meningkat 0,369 satuan. Hasil tes hipotesis menunjukkan signifikansi skor 0,000, thitung = 5,268, dan ttabel = 1,67. Jika ttabel kurang dari 0, maka Ho ditolak, yang menunjukkan X1 mempunyai pengaruh yang signifikan pada Y. Penemuan studi ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Yunitasari et al., 2024) dengan penjelasan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh penerapan sistem akuntansi pemerintahan (SAP).

KESIMPULAN

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan standar. Hasil penelitian ini memberikan *support* pada penelitian sebelumnya, terutama instansi pemerintah tentang tingkat kepuasan pengguna dengan pelaporan. Hal ini menjelaskan bahwa anggaran yang menggunakan akuntan public dianggap lebih baik. Penggunaan akuntansi yang lebih baik di sektor publik akan meningkatkan akuntabilitas karena pengambilan keputusan dan pencatatan transaksi keuangan dapat dilakukan sesuai dengan keinginan badan tersebut. Evaluasi kinerja lembaga negara. Hasil pelaporan keuangan Kota Medan dapat ditingkatkan secara signifikan jika standar akuntansi provinsi diterapkan, pengelolaan mengenai sistem pengendalian internal secara efektif, dan SDM yang sesuai.

Akuntansi berkembang, terutama akuntansi sektor publik. Hasil penelitian menjelaskan standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi di sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini memberikan bukti lanjutan bahwa kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh kepada keberhasilan penerapan akuntansi di sektor publik. produk terkena dampak. Tata Kelola Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menerapkan akuntansi yang efektif di sektor publik, diperlukan perhatian khusus pada elemen pelaporan keuangan. Pada akhirnya, ini dapat berdampak pada peningkatan tata kelola yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adhillah, M. N. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, *4*(2), 197–212. https://doi.org/10.59261/jequi.v4i2.100

Agustina Mutia, Achyat Budianto, & Mistiani Mistiani. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *16*(2), 354–368. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1301

Kambey, J. P., Tawas, Y., & Tendean, V. (2023). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *4*(3), 642–653. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5037

Lantu, F. T., Pangkey, R., & Sumampouw, O. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, *4*(1), 91–97. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4255

Lestari Utami, R., -, Y., & Erwati, M. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, *8*(2), 283–302. https://doi.org/10.30631/ijoieb.v8i2.1890

Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, *3*(1), 23–34. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.366

Sari, P., & Tamsir. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato). *SEIKO: Journal of Management & Business*, *6*(1), 784–791. https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.4046

Yunitasari, F. A., Setyowati, L., Durya, N. P. M. A., & Pamungkas, I. D. (2024). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, *10*(1), 58–71. https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1715